



IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH SERTA STRATEGI PENCAPAIAN

4.1. Pendapatan Daerah

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenan

Arah Kebijakan Perencanaan Pendapatan daerah Pemerintah Kota Kendari direfleksikan dari praktek dan pengalaman kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada lima tahun terakhir (Periode Tahun 2003-2007), yang berfokus pada aspek: (1) Pendapatan; (2) Belanja; (3) Pembiayaan Daerah dan (4) Capaian Kinerja yang diorientasikan pada arah pencapaian visi dan misi yang terangkum dalam Perda Pemerintah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2001.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah berfokus pada upaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi aset dan kekayaan pemerintah daerah serta pengembangan potensi pendapatan BUMD.

Pengelolaan Keuangan Daerah menganut prinsip: (1) Potensial artinya lebih menitik beratkan pada potensinya dari pada jumlah atau jenis pungutan yang banyak; (2) Tidak memberatkan masyarakat; (3) Tidak merusak lingkungan; (4) Mudah diterapkan/diaplikasikan, mudah dilaksanakan dan (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif dan materinya.

Pendapatan daerah adalah unsur terpenting dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah karena merupakan sumber pembiayaan yang sangat strategis; melihat prediksi lima tahun ke depan, ternyata persentasi kenaikan belanja lebih besar dari pada kenaikan pendapatan. Oleh karena itu harus ditempuh sejumlah langkah dalam upaya membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan.



Apabila APBD diperkirakan defisit, maka pembiayaan pembangunan dapat didanai dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan melakukan pinjaman daerah.

Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan daerah konsisten diarahkan pada optimalisasi fungsi anggaran pemerintah daerah, yakni :

- a. Fungsi Alokasi ; berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- b. Fungsi Distribusi ; berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- c. Fungsi Stabilitas ; memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Meskipun demikian, kebijakan pembiayaan pembangunan melalui hutang harus memenuhi syarat yaitu hutang tersebut dipergunakan untuk investasi dan/atau mempunyai dampak yang luas terhadap kepentingan masyarakat.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Prndapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kapasitas pengelolaan keuangan daerah Kota Kendari menentukan kemampuan Pemerintah Kota Kendari dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Dimana kemampuan pengelolaan keuangan diukur melalui penerimaan pendapatan daerah. Data menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan daerah Pemerintah Kota Kendari dari tahun ke tahun cenderung menunjukkan peningkatan, namun kontribusi PAD terhadap



penerimaan masih relatif kecil dibanding dengan sumber penerimaan dari dana perimbangan.

Kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras agar komposisi perimbangan PAD dan pendapatan dari pusat mencapai titik keseimbangan (*equilibrium*).

Di bawah ini digambarkan penerimaan pendapatan Kota Kendari dari Tahun 2003 s/d 2008 dan proyeksi pendapatan tahun 2009.



Tabel 4.1 Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan dan Target Pendapatan Kota Kendari Tahun 2003s/d 2008 (Rupiah)

No.	URAIAN	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Target Pendapatan 2009
	BAGIAN PENDAPATAN							
A	ASLI DAERAH	13,893,277,840.07	14,112,540,263.00	15,657,973,964.00	20,125,438,856.70	23,277,791,368.00	28,795,375,717.00	28,795,375,717.00
	a. Pajak Daerah	4,793,309,970.00	5,612,449,761.00	6,211,176,102.00	7,233,695,530.00	8,247,041,750.00	9,368,963,000.00	10,635,897,317.00
	b. Retribusi Daerah	5,398,239,381.00	5,938,213,480.00	6,594,485,726.00	7,867,912,565.00	9,191,526,000.00	12,266,934,317.00	11,000,000,000.00
	c. Hsl Pengelo. Kekayaan Daerah	135,038,228.00	196,302,038.00	304,022,149.00	-	304,022,149.00	821,031,773.00	-
	d. Lain-lain PAD yang syah	3,566,690,261.07	2,365,574,984.00	2,548,289,987.00	5,023,830,761.70	5,535,201,469.00	6,338,446,627.00	7,159,478,400.00
B	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	168,202,847,201.93	177,913,479,762.95	187,283,157,968.00	311,542,171,168.00	348,903,508,851.00	400,371,093,661.00	437,483,215,661.00
	a. Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	15,546,880,341.99	17,531,237,712.00	26,200,207,968.00	22,392,188,892.00	25,774,508,851.00	29,246,215,661.00	29,246,215,661.00
	b. Dana Alokasi Umum (DAU)	140,329,550,000.00	145,149,750,000.00	152,932,950,000.00	251,375,000,000.00	286,250,000,000.00	325,325,337,878.00	357,872,000,000.00
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	5,911,076,000.00	7,909,750,000.00	8,150,000,000.00	26,030,000,000.00	36,879,000,000.00	45,787,000,000.00	50,365,000,000.00
	d. Dana Perimbangan dari Propinsi	6,415,340,859.94	7,322,742,050.95	-	11,744,982,276.00	11,935,752,974.00		
C	BAGIAN PINJAMAN DAERAH	7,752,231,127.02	-	-	-	-	-	-
	a. Bagian Pinjaman Daerah	7,752,231,127.02	-	-	-	-	-	-
D	BAGIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH	187,040,000.00	4,930,460,000.00	10,720,891,000.00	11,757,684,000.00	7,009,000,000.00	24,408,798,374.00	23,500,000,000.00
	a. lain-lain Pendapatan daerah yang sah	187,040,000.00	4,930,460,000.00	10,720,891,000.00	11,757,684,000.00	7,009,000,000.00	24,408,798,374.00	23,500,000,000.00
	JUMLAH	192,817,016,042.00	203,783,704,025.95	209,950,131,932.00	332,067,610,024.70	384,117,053,193.00	453,575,267,752.00	489,778,591,378.00

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Kendari, 2008.



Tabel di atas menunjukkan bahwa proporsi pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan baik pos bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU maupun DAK. Hal ini menunjukkan bahwa ratio kemandirian keuangan daerah masih rendah atau rata-rata baru mencapai 24, 2 %. Oleh karena itu upaya menggali perolehan pendapatan harus dilakukan secara sistematis dan terarah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki seoptimal mungkin melalui riset potensi daerah.

4.1.3. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Strategi Pemerintah Kota Kendari dalam pencapaian target pendapatan diarahkan untuk memantapkan landasan ekonomi daerah yang mandiri; antara lain adalah :

- a. Meminimalisasikan gejolak fluktuasi ekonomi dengan memberikan bantuan dan proteksi kepada masyarakat miskin agar tetap mampu mencukupi kebutuhan dasar minimumnya.
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata dengan prioritas pada bidang perdagangan dan jasa sebagai tulang punggung perekonomian daerah dengan memacu wilayah pengembangan.
- c. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha sektor informal, Koperasi dan UKM serta keadilan kesempatan untuk berusaha dalam iklim yang kondusif.
- d. Meningkatkan iklim investasi guna mendorong agar dapat mengurangi hambatan-hambatan baik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, permodalan, infrastruktur, kelembagaan serta kepastian dan keamanan berinvestasi.



- e. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pemantapan kehidupan beragama, pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak dengan memprioritaskan pada golongan masyarakat miskin.
- f. Mengembangkan iklim kondusif bagi peningkatan swadaya melalui pola/skema kemitraan baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, pemerintah daerah dengan swasta atau masyarakat dengan swasta.
- g. Struktur ekonomi kota diarahkan untuk mewujudkan struktur perekonomian kota yang kokoh dimana perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas perekonomian yang didukung oleh aktivitas perekonomian lainnya.
- h. Mengoptimalkan pendapatan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat.
- i. Mengoptimalkan pengelolaan Asset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah, melalui profesionalisme manajemen.
- j. Menumbuhkembangkan iklim yang sehat di BUMD sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah termasuk mendirikan BUMD dan/atau perusahaan milik Pemerintah daerah yang *profitable*.
- k. Mengoptimalkan pengelolaan pengeluaran daerah yang didasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.



4.2. Belanja Daerah

4.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah meliputi total Perkiraan Belanja daerah;

Kebijakan Perencanaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*.

Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran; sehingga dengan demikian perlu pengelolaan dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*) melalui pendekatan kinerja (*performance oriented*). Pengeluaran daerah juga harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi terkait, yang berdasarkan pada standar analisa belanja (SAB), standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal (SPM) serta memperhatikan prinsip *value for money*. Identifikasi belanja pengeluaran akan dibedakan menurut belanja langsung dan tidak langsung guna meningkatkan aspek efektifitas dan akuntabilitasnya.



Adapun total belanja tahun 2007 dan tahun 2008 serta perkiraan belanja pada tahun 2009 dilihat pada table, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Total Belanja Daerah Tahun 2007 dan Tahun 2008 serta perkiraan belanja tahun 2009

NO.	TAHUN	NILAI PROYEKSI (Rupiah)
1	2	3
1.	Tahun 2007	437,179,316,128,00
2.	Tahun 2008	510,700,224,258,78
3.	Tahun 2009	558,636,028,784,00

Sumber: Data diolah, 2008

4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;

Kebijakan belanja pegawai, bunga subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga, maka kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai;

- a. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNS, maka dalam penghitungan acress besarnya 5(lima) persen dari jumlah belanja pegawai.
- b. Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNS akan disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang mengatur tentang pemberian gaji dan tunjangan.
- c. Untuk mengantisipasi gaji dan tunjangan bagi pengangkatan CPNS akan disediakan dalam APBD Kota Kendari.
- d. Untuk peningkatan kesejahteraan PNS lingkup Pemerintah Kota Kendari di beri tambahan penghasilan dengan



pertimbangan prestasi kerja yang kriterianya diatur dalam Perwali Nomor 1 tahun 2008 tentang Tunjangan Kinerja sedangkan besaran tunjangan kinerja diatur dalam Perwali Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Kota Kendari Tahun 2009.

- e. Sedangkan belanja pegawai untuk Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur masalah tersebut.

2. Belanja Bunga;

Dalam hal belanja bunga, maka Pemerintah Kota memiliki pinjaman jangka panjang dan setiap tahunnya di anggarkan dalam APBD yang jumlahnya sesuai dengan komitmen pada saat dilakukannya negosiasi pinjaman.

3. Belanja Subsidi

Belanja subsidi diperuntukan kepada perusahaan darah atau lembaga lain yang bertujuan untuk membantu biaya produksi/jasa yang dihasilkan oleh lembaga tersebut, namun pada tahun 2008 dalam APBD tidak ada belanja subsidi dan tahun 2009 juga belanja subsidi tidak dianggarkan lagi.

4. Belanja Hibah;

- a. Pemberian hibah ini dimaksudkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertical seperti TMMD dan KPUD), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- b. Untuk menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah akan dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah;



- c. Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah, maka pemberian hibah dilengkapi dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang hibah dan bantuan daerah;

5. Belanja Bantuan Sosial

- a. Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan social dan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah memberikan bantuan social kepada kelompok/anggota masyarakat, namun dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi;
- b. Untuk bantuan keuangan kepda partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan kepda partai politik;

6. Belanja Bagi Hasil

Untuk penganggran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah kelurahan disesuaikan dengan rencana pendapatan pada tahun anggaran 2009;

7. Belanja Bantuan Keuangan

- a. Bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kota dapat diberikan bantuan keuangan kepada kelurahan dan kecamatan.
- b. Bantuan keuangan yang khusus dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota kepada pemerintah kelurahan diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan.



8. Belanja Tidak Terduga

Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2008 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat di prediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah kota, serta tidak biasa/tanggap darurat yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2009.

Tabel 4.3
Rekapitulasi Belanja Kota Kendari Tahun 2007 s/d 2009(Rupiah)

NO.	URAIAN	2007	2008	2009
A	BELANJA DAERAH			
	Belanja Tidak Langsung	239,101,952,952.00	268,649,154,294.78	369,997,004,355.00
	a. Belanja Pegawai	216,481,425,947.00	250,052,367,999.78	352,692,800,292.00
	b. Belanja Bunga	66,855,805.00	263,716,295.00	149,204,063.00
	c. Belanja Subsidi	1,090,000,000.00		
	d. Belanja Hibah		455,000,000.00	455,000,000.00
	e. Belanja bantuan Sosial	19,963,671,200.00	12,778,070,000.00	7,900,000,000.00
	f. Belanja Bantuan Keuangan kpd Pem.Des		3,700,000,000.00	7,400,000,000.00
	g. Belanja tidak terduga	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
B	BELANJA LANGSUNG	198,077,363,176.00	242,051,069,964.00	188,639,024,429.00
	a. Belanja Pegawai	29,040,290,815.00	24,325,453,673.00	21,880,822,164.30
	b. Belanja Barang & Jasa	72,286,214,789.00	73,612,351,492.00	54,738,876,171.00
	c. Belanja Modal	96,750,857,572.00	144,113,264,799.00	112,019,326,093,70
	JUMLAH BELANJA	437,179,316,128.00	510,700,224,258.78	558,636,028,784.00
	SURPLUS/DEFISIT	(53,062,262,935.00)	(57,124,956,506.78)	(68,857,437,406.00)

Sumber: DPKAD Kota Kendari , 2008.



4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun secara terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang akan dilaksanakan

Dalam tahun 2009 Kebijakan Umum Anggaran yang akan dilaksanakan merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan Pembangunan tahun 2007 dan perkiraan tahun 2008 yang merupakan tahun terakhir dan tahun pertama RPJMD tahun 2008 - 2013 (Perda Nomor 16 tahun 2008) memberikan kemajuan penting dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai visi, misi dan strategi yang dimuat dalam RPJMD tahun 2003 - 2008 dengan menitik beratkan pada delapan isu pokok atau focus prioritas pembangunan diamanatkan dalam Renstra Kota Kendari sesuai Perda Nomor 10 tahun 2001 tentang Visi Misi dan Strategi Kebijakan (Vimistra) Kota Kendari Tahun 2000-2020.



Dari gambaran kemajuan yang dicapai dalam tahun 2007 dan perkiraan tahun 2008, serta tantangan yang di hadapi tahun 2009, maka tema pembangunan tahun 2009 adalah :

”Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan”

Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat 8 (delapan) prinsip pengarusutamaan menjadi landasan operasional bagi seluruh SKPD dan aparat pelaksana, yaitu:

1) Pengarusutamaan peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan (*Environment*)

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan keadilan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan, serta terwujudnya keadilan antar generasi, antar dunia usaha dan masyarakat, dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal.

2) Pengarusutamaan peningkatan fungsi Kota Kendari sebagai Kota Pelayanan Skala Regional dan Terpenuhinya Tingkat Kebutuhan Masyarakat (*Environment, Employment, Engagement*)

Sasaran dari prioritas ini adalah meningkatkan fungsi Kota Kendari sebagai kota pelayanan skala regional khususnya wilayah Sulawesi Tenggara dalam bidang perdagangan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, pariwisata dan agribisnis, melalui penguatan infrastruktur di sektor jalan kota, kelistrikan dan air bersih

3) Pengarusutamaan peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan Visi Indonesia Sehat 2010 (*Equity, Engagement*)

Sasaran pada prioritas ini adalah terpenuhinya sasaran angka derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan Visi Indonesia Sehat



2010, meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk memelihara lingkungan sehat serta meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan logistik pada sarana pelayanan kesehatan yang semakin merata, terjangkau dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

4) Pengarusutamaan peningkatan Kualitas Pelayanan dan Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pelestarian Nilai-Nilai Budaya (*Ethic, Employment dan Equity*)

Sasaran pada prioritas ini adalah meningkatnya Angka Partisipasi sekolah SD dan SLTP, meningkatnya mutu pendidikan serta terwujudnya organisasi sekolah sebagai unit pelayanan terdepan pendidikan yang profesional, partisipatif, transparan, efisien dan akuntabel.

5) Pengarusutamaan peningkatan Rasa Aman, Sikap Hidup yang Tertib dan Disiplin bagi Seluruh Warga Masyarakat (*Ethic, Engagement*)

Sasaran pada prioritas ini adalah meningkatnya rasa aman bagi seluruh warga masyarakat, berkurangnya angka kejahatan (dengan kekerasan) dan kriminal lainnya, meningkatnya sikap hidup yang tertib dan disiplin warga kota utamanya di tempat dan sarana publik, serta meningkatnya peranserta masyarakat pada semua tahap pembangunan: perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi pembangunan

6) Pengarusutamaan penegakkan Prinsip-Prinsip Kepemerintahan yang Baik (*good governance*) dan Penegakan Supremasi Hukum (*Ethic, Equity dan Engagement*)

Sasaran pada prioritas ini adalah terciptanya harmonisasi peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan dan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang berpijak pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.



7) Pengarusutamaan peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif dan Adil bagi semua Pelaku Usaha dalam Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan, Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran (*Environment, Employment, Engagement dan Equity*)

Segala upaya pembangunan yang dilakukan, harus diorientasikan pada Penguatan ekonomi masyarakat. Strategi penguatan ekonomi masyarakat merupakan sistem yang terintegrasi, mulai dari pemberian peluang kesempatan ekonomi yang merata, akses masyarakat terhadap permodalan, perlindungan pasar hingga wujud kelembagaan kemitraan antara usaha kecil, menengah dan besar. Disamping itu, Pemerintah Kota akan berupaya mendorong kemudahan investasi dari masyarakat maupun swasta, dalam rangka memperluas cakupan dan daya serap tenaga kerja.

8) Pengarusuataan peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah (*Ethic dan Engagement*)

Sasaran pada prioritas ini adalah terbentuknya sistem kerja dan struktur organisasi pemerintah yang efisien dan efektif, meningkatkan kapasitas DPRD sebagai mitra eksekutif dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur

Sesuai kebijakan ekonomi makro serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, sasaran ekonomi makro tahun 2009 adalah Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,86 persen dan laju inflasi sebesar 6,0 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin akan menurun. Pengangguran terbuka diperkirakan akan turun menjadi 8,0 - 10,0 persen dari jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi 20,8 persen pada tahun 2009.



Pertumbuhan ekonomi didorong dengan meningkatkan investasi, mendorong ekspor nonmigas, serta memberi stimulus fiskal dalam batas kemampuan keuangan daerah untuk menggerakkan semua sektor produksi, terutama industri dan pertanian. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, ditingkatkan untuk mendorong peranan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Dalam tahun 2009, perekonomian diperkirakan tumbuh sebesar 8,86 persen, lebih tinggi dibandingkan perkiraan tahun 2008 (antara 7,0 - 8,0 persen). Dalam keseluruhan tahun 2009, dengan teriaganya stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat membaik dengan konsumsi masyarakat diperkirakan terus tumbuh diatas 10 persen, sedangkan pengeluaran pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 5 persen. sektor pertanian tumbuh sebesar 5,50 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 12 persen, sektor industri pengolahan sebesar 9 persen; sektor listrik, gas dan air sebesar 10 persen, sektor konstruksi sebesar 11 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 6,5 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh sebesar 14 persen dan sektor jasa-jasa sebesar 6,5 persen

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika tidak disertai dengan pemerataan pembangunan akan berdampak terhadap ketimpangan pendapatan dan ketimpang pembagian porsi pembangunan untuk menciptakan pemerataan perlu adanya kebijakan strategis melalui APBD dengan mengacu pada nilai manfaat. Keberpihakan APBD terhadap kepentingan masyarakat diwujudkan dalam program kegiatan satuan unit kerja yang berorientasi terhadap kepentingan publik, sehingga melalui penyaluran dana P2MK kepada Kelurahan dan Kecamatan diharapkan dapat menjadi stimulan peningkatan produktifitas masyarakat.



Sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008, Pemerintah Kota tetap konsisten pada fokus 8 (delapan) sasaran pokok pembangunan kota yakni;

1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang berkelanjutan (*Environment*)
2. Meningkatkan Fungsi Kota Kendari sebagai Kota Pelayanan Skala Regional dan Terpenuhinya Tingkat Kebutuhan Masyarakat (*Environment, Employment, Engagement*)
3. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan Visi Indonesia Sehat 2010 (*Equity, Engagement*)
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pelestarian Nilai-Nilai Budaya (*Ethic, Employment dan Equity*)
5. Meningkatkan Rasa Aman, Sikap Hidup yang Tertib dan Disiplin bagi Seluruh Warga Masyarakat (*Ethic, Engagement*)
6. Menegakkan Prinsip-Prinsip Kepemerintahan yang Baik (*good governance*) dan Penegakan Supremasi Hukum (*Ethic, Equity dan Engagement*)
7. Meningkatkan Iklim Usaha yang Kondusif dan Adil bagi semua Pelaku Usaha dalam Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan, Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran (*Environment, Employment, Engagement dan Equity*)
8. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah (*Ethic dan Engagement*)

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap



memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing lembaga serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Kota, rapat koordinasi Pusat (Rakorpus), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas).

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2009 merupakan acuan bagi SKPD dan masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 didalamnya penjabarannya mengatur urusan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan; urusan wajib pemerintahan adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib dan pilihan telah dibagi kewenangan kedalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Kendari. Adapun jumlah SKPD yang ada terdiri atas 11(sebelas) lembaga teknis daerah dan 13(tiga belas) dinas daerah 1(satu) sekretariat daerah kota, 1(satu) sekretariat DPRD Kota, 10 (sepuluh) Kecamatan dan 64(enam puluh empat) Kelurahan, sebagaimana nama-nama SKPD tersebut dibawah ini:



A. Sekretariat Daerah

1. Sekretaris Daerah Kota Kendari (Es. II/a)
2. Asisten
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Es. II/b)
 - (i) Bagian Pemerintahan Umum (Es. III/a)
 - (ii) Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat (Es. III/a)
 - (iii) Bagian Adm. Masyarakat dan Humas (Es. III/a)
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Es. II/b)
 - (i) Bagian Adm. Pembangunan (Es. III/a)
 - (ii) Bagian Adm. Sumber Daya Alam (Es. III/a)
 - (iii) Bagian Adm. Perekonomian (Es. III/a)
 - c. Asisten Administrasi Umum (Es. II/b)
 - (i) Bagian Hukum dan Perundang-undangan (Es. III/a)
 - (ii) Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Es. III/a)
 - (iii) Bagian Umum (Es. III/a)

B. Sekretariat DPRD

- Sekretaris DPRD Kota Kendari (Es. II/b)
- (i) Bagian Umum (Es. III/a)
 - (ii) Bagian Persidangan (Es. III/a)
 - (iii) Bagian Keuangan (Es. III/a)
 - (iv) Bagian Hukum (Es. III/a)

C. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:

1. Inspektorat Daerah (Es. II/b)
2. Bappeda dan Penanaman Modal (Es. II/b)
3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Es. II/b)
4. Badan Kepegawaian Daerah (Es. II/b)
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Es. II/b)
6. Kantor Lingkungan Hidup (Es. III/a)
7. Kantor Penyelenggara Pelayanan Perizinan (Es. III/a)
8. Kantor Pemadam Kebakaran (Es. III/a)
9. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi (Es. III/a)
10. Kantor Polisi Pamong Praja (Pol. PP) (Es. III/a)
11. Rumah Sakit Abunawas (Es. III/a)

D. Dinas Daerah terdiri dari:

12. Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari (Es. II/b)
13. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Es. II/b)
14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Es. II/b)
15. Dinas Pekerjaan Umum Kota Kendari (Es. II/b)
16. Dinas Perhubungan Kota Kendari (Es. II/b)
17. Dinas Kesehatan Kota Kendari (Es. II/b)
18. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Es. II/b)
19. Dinas Tata Kota dan Perumahan (Es. II/b)



20. Dinas Pertanian dan Kehutanan (Es. II/b)
21. Dinas Perikanan dan Kelautan (Es. II/b)
22. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM (Es. II/b)
23. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan (Es. II/b)
24. Dinas Kebersihan (Es. II/b)

E. Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

1. Camat Eselon III/a terdiri atas 10 Kecamatan
2. Lurah Eselon IV/a terdiri atas 64 Kelurahan

Guna pelaksanaan urusan wajib dan pilihan, maka perlu memberikan ancar-ancar plafond kepada SKPD sebagai berikut :

Tabel 4. 4

ANCAR-ANCAR PLAFON ANGGARAN BELANJA SKPD TAHUN 2009

No.	URUSAN/SKPD	BELANJA LANGSUNG
		(Rp.) PERUBAHAN
1	2	3
A	URUSAN WAJIB	
<u>1</u>	Dinas Pendidikan	24.248.499.817
<u>2</u>	Dinas Kesehatan	13.688.020.000
<u>3</u>	Rumah Sakit Umum Daerah	5.096.357.571
<u>4</u>	Dinas Pekerjaan Umum	55.254.440.229
<u>5</u>	Kantor Pemadam Kebakaran	1.171.128.000
<u>6</u>	Dinas Tata Kota dan Perumahan	1.367.734.200
<u>7</u>	Bappeda Dan Penanaman Modal Daerah	6.229.392.000
<u>8</u>	Dinas Perhubungan	1.142.791.607
<u>9</u>	Kantor Lingkungan Hidup	1,312,393,000
<u>10</u>	Dinas Kebersihan	3,481,132,200
<u>11</u>	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	657.295.500
<u>12</u>	Badan Kepegawaian Daerah	3,664,532,000
<u>13</u>	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB	5,779,525,000
<u>14</u>	Badan Pembinaan Kesatuan Bangsa, Politik & Linmas	528,483,000
<u>15</u>	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	788,636,250
<u>16</u>	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
1	2	3
<u>17</u>	Walikota dan Wakil Walikota	
<u>18</u>	Sekretariat Daerah	17,551,074,867
<u>19</u>	Sekretariat DPRD	7,343,835,000
<u>20</u>	Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah	14,261,523,550
<u>21</u>	Inspektorat	1,144,016.000
<u>22</u>	Kantor Pelayanan Perizinan	519,786,000



23	Kantor Arsip Daerah	300,000,000
24	Kecamatan Mandonga	177,240,000
25	Kecamatan Kendari	197,550,000
26	Kecamatan Poasia	193,950,000
27	Kecamatan Baruga	192,790,000
28	Kecamatan Kendari Barat	186,700,000
29	Kecamatan Abeli	190,350,000
30	Kecamatan Kadia	182,720,000
31	Kecamatan Wua - Wua	174,400,000
32	Kecamatan Kambu	175,000,000
33	Kecamatan Puwatu	197,929,600
34	Kelurahan Gunung Jati	143,710,000
35	Kelurahan Mangga Dua	127,670,000
36	Kelurahan Kampung Salo	128,420,000
37	Kelurahan Kasilampe	138,955,000
38	Kelurahan Kendari Caddi	138,450,000
39	Kelurahan Mata	129,090,000
40	Kelurahan Purirano	130,270,000
41	Kelurahan Kandai	140,105,000
42	Kelurahan Jati Mekar	137,290,000
43	Kelurahan Tobuuha	140,970,000
44	Kelurahan Mandonga	154,822,000
45	Kelurahan Puwatu	155,950,000
46	Kelurahan Labibia	129,830,000
47	Kelurahan Alolama	136,990,000
48	Kelurahan Korumba	145,467,500
49	Kelurahan Punggolaka	142,260,000
50	Kelurahan Watulondo	154,989,000
51	Kelurahan Wawombalata	133,103,000
52	Kelurahan Angilowu	130,846,000
53	Kelurahan Matabubu	130,769,000
54	Kelurahan Anduonohu	152,400,000
1	2	3
55	Kelurahan Rahandouna	144,842,000
56	Kelurahan Anggoeya	138,775,000
57	Kelurahan Mokoau	130,150,000
58	Kelurahan Kambu	161,090,000
59	Kelurahan Padaleu	139,000,000
60	Kelurahan Wua-wua	153,590,000
61	Kelurahan Lepo-lepo	150,450,000
62	Kelurahan Kadia	165,200,000
63	Kelurahan Bende	164,030,000



64	Kelurahan Baruga	155,141,500
65	Kelurahan Bonggoeya	138,880,000
66	Kelurahan Watubangga	154,880,600
67	Kelurahan Kemaraya	150,630,000
68	Kelurahan Watu-watu	143,176,000
69	Kelurahan Tipulu	144,153,000
70	Kelurahan Sanua	137,645,000
71	Kelurahan Sodohoa	145,070,500
72	Kelurahan Benu-benua	133,770,250
73	Kelurahan Punggaloba	139,980,000
74	Kelurahan Dapu-dapura	132,864,500
75	Kelurahan Abeli	132,148,100
76	Kelurahan Lapulu	159,310,000
77	Kelurahan Talia	132,070,000
78	Kelurahan Tobimeita	129,320,000
79	Kelurahan Nambo	128,170,000
80	Kelurahan Bungkutoko	129,310,000
81	Kelurahan Sambuli	127,772,000
82	Kelurahan Poasia	133,290,000
83	Kelurahan Benua Nirae	129,658,000
84	Kelurahan Puday	126,890,000
85	Kelurahan Anggalomelai	129,172,500
86	Kelurahan Petoaha	132,890,000
87	Kelurahan Tondonggeu	128,520,000
88	Kelurahan Wowawanggu	138,970,000
89	Kelurahan Anaiwoi	143,157,000
90	Kelurahan Mataiwoi	138,929,000
91	Kelurahan Anawai	145,415,000
92	Kelurahan Pondambea	137,700,000
1	2	3
93	Kelurahan Wundudopi	140,070,000
94	Kelurahan Lalolara	137,650,000
95	Kelurahan Lalodati	127,975,500
96	Kelurahan Lahundape	137,000,000
97	Kelurahan Abeli Dalam	126,490,000
98	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	747,425,000
99	Dinas Pertanian dan Kehutanan	4,906,107,206
100	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	2,302,207,500
101	Dinas Kelautan dan Perikanan	3,173,455,500
102	Dinas Perindustrian,Perdagangan Koperasi & PKM	1,173,455,500
Jumlah Pengeluaran		188,639,024,429

Sumber : data primer diolah, 2008



4.2.5. Strategi Efektifitas dan efisiensi belanja:

Berkaitan dengan penganggaran belanja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah tahun anggaran 2009 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lainnya yang diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan dalam menghadapi permasalahan dan tantangan global dan nasional yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik wilayah, sehingga implementasi pembangunan dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Penyusunan APBD tahun anggaran 2009 perlu disesuaikan dengan perkiraan ekonomi makro dan dalam pengefektifan sumber-sumber penerimaan dan belanja agar lebih mengutamakan untuk program-program yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Terkait dengan optimalisasi penetapan program, kegiatan dan pendanaan pembangunan perlu dilakukan penyesuaian sasaran program dan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi, sehingga diharapkan bobot alokasi APBD betul-betul dapat difokuskan untuk urusan yang menjadi kewenangannya dan membatasi penggunaan APBD untuk mendanai program dan kegiatan di luar kewenangannya. Selain itu diupayakan agar alokasi anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta DAK betul-betul mencerminkan prioritas pembangunan yang sangat dibutuhkan, dengan demikian SKPD lingkup Pemerintah Kota perlu membangun komunikasi dan koordinasi intensif secara proaktif pada semua tingkatan pemerintahan.



4. Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan sesuai prioritas nasional dan daerah dalam kerangka desentralisasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), maka perlu mengalokasikan dana pendamping dalam APBD sesuai dengan criteria dan ketentuan yang dipersyaratkan.
5. Sinkronisasi kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah supaya dilakukan dengan mempedomani pembagian urusan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
6. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output atau nilai manfaat yang dihasilkan dari satu kegiatan; oleh karena itu untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.
7. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar.
8. Untuk mendukung kebijakan nasional, pemerintah daerah selain merencanakan anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas di daerah, perlu juga dilakukan dukungan pendanaan terhadap :
 - a. Peningkatan stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta upaya membangun masyarakat madani, agar SKPD memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan secara komprehensif dan terintegrasi serta memfasilitasi komunikasi dengan elemen masyarakat guna menciptakan ketentraman dan ketertiban termasuk peningkatan kerukunan ummat beragama.
 - b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah kota dan kelurahan, upaya pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program seperti



- peningkatan kapasitas ekonomi rakyat dalam rangka penganggulan kemiskinan, peningkatan administrasi pemerintahan kelurahan, dukungan terhadap kegiatan PKK dan bulan bakti gotong royong, termasuk upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan teknologi pedesaan guna menunjang efektivitas pengelolaan pembangunan di pedesaan/kelurahan.
- c. Dalam rangka mendukung kebijakan di bidang UMKM, agar daerah memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan peran BLUD dalam menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan melali dukungan permodalan yang memadai serta member kesempatan pada UMKM untuk dapat berperan dalam berbagai kegiatan di lingkungan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang baik, agar dilakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan daerah, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrument lebih akuntabel dan transparan.

4.3. Pembiayaan Daerah

Dalam rangka menutup deficit anggaran, pemerintah kota dapat melakukan pinjaman daerah, yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat (*obligasi daerah*). Pencantuman jumlah pinjaman dalam APBD harus didasarkan pada keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD.



4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Ada beberapa sumber penerimaan pembiayaan, seperti :

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi dan didefenitifkan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

b) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah.

c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah kota dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah kota.

d) Penerimaan Pinjaman daerah

Dalam rangka menutup deficit anggaran, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah, yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat (obligasi daerah)



Pinjaman daerah akan menambah kekayaan daerah dan merupakan satu kesatuan siklus pengelolaan keuangan daerah, yang dimulai dari penganggaran dalam APBD.

e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

f) Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari dari pelunasan piutang pihak ketiga seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah.

g) Penerimaan kembali penyertaan modal (*investasi*) daerah

Penerimaan kembali penyertaan modal (*investasi*) daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pernyataan modal yang diterima kembali.

Tabel 4. 5
Rekapitulasi Penerimaan Pembiayaan Kota Kendari
Tahun 2007 s/d dan proyeksi 2009(Rupiah)

NO.	URAIAN	2007	2008	2009
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN Belanja Tidak Langsung	55,883,305,427.00	59,122,218,494.78	8,000,000,000.00
	Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun Lalu	55,883,305,427.00	59,122,218,494.78	8,000,000,000.00
	JUMLAH Penerimaan Pembiayaan	55,883,305,427.00	59,122,218,494.78	8,000,000,000.00

Sumber: DPKAD Kota Kendari , 2008.



4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

a) Pembentukan Dana Cadangan

Digunakan untuk menganggarkan dana yang disihkan untuk dicadangkan dalam tahun 2009 yang akan di transfer kerekening dana cadangan dari rekening kas umum daerah. Jumlah yang dianggarkan dan di transfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

b) Penyertaan modal pemerintah daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan di investasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah.

Jumlah yang dianggarkan, disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga, investasi daerah sebagaimana yang dimaksud dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pembentukan dana bergulir kepada kelompok masyarakat.

Investasi dalam bentuk deposito dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu likuiditas kas daerah.

c) Pembayaran pokok utang

Jumlah pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo dalam tahun anggaran 2009 termasuk tunggakan.

d) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.



Tabel 4. 6
Rekapitulasi Pengeluaran Pembiayaan Kota Kendari
Tahun 2007 s/d dan proyeksi 2009(Rupiah)

NO.	URAIAN	2007	2008	2009
	Pengeluaran Pembiayaan	2,821,042,492.00	1,997,261,988.00	1,160,080,720.00
	Pembentukan dana cadangan			
	Penyertaan modal (Investasi) daerah	2,660,961,772.00	1,675,473,060.00	1,000,000,000.00
	Pembayaran pokok utang	160,080,720.00	321,788,928.00	160,080,720.00
	Pemberian pinjaman daerah			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2,660,080,720.00	1,997,261,988.00	1,160,080,720.00

Sumber: DPKAD Kota Kendari, 2008.

4.3.3 Strategi Pembiayaan

Berkaitan dengan kebijakan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah tahun anggaran 2009 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan optimalisasi penetapan program, kegiatan dan pendanaan pembangunan perlu dilakukan penyelarasan sasaran program dan kegiatan dan pembiayaan khususnya dari pos SILPA hanya diperuntukan untuk menupi deficit anggaran.
2. Pengeluaran pembiayaan dari Pos lain utamanya dana cadangan perlu adanya persetujuan Kepala daerah dan DPRD, namun sebelumnya kegiatannya harus dilakukan analisis teknis dan kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output atau nilai manfaat yang dihasilkan dari satu kegiatan; oleh karena itu untuk menghindari adanya pemborosan, direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.
3. Pengeluaran pembiayaan dilakukan untuk membiayai kewajiban Pemerintah Kota kepada pihak ketiga; seperti pembayaran utang pokok.
4. Hal-hal lain yang sifatnya untuk penggunaan pada pos pembiayaan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan tentang itu.